



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAEAH (LPPD)**

2017

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
(BKPMMD)
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-Nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2016 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2016 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan Selatan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2016 dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Selatan ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD khususnya dan Pemerintah Provinsi Kalsel umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, Januari 2017

Plt, Kepala Dinas PM dan PTSP
Provinsi Kalimantan Selatan,

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S.Hut, MP

Pembina Tk I

NIP. 19710321 199302 1 001

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) dan LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAEAH (LPPD) TAHUN 2016**

I. URUSAN DESENTRALISASI (URUSAN PENANAMAN MODAL)

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program

Program Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- 5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi ; dan
- 6) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

2. Kegiatan

Dari program tersebut di atas, dijabarkan menjadi kegiatan. Adapun kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - Penyediaan jasa surat-menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa Administrasi keuangan
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - Pengadaan peralatan gedung kantor
 - Pengadaan komputer
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
- Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
 - Pengembangan Wawasan SDM BKPMMD Prov Kalsel
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
- Penyusunan pelaporan triwulan dan pelaporan keuangan akhir tahun
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
- Penyelenggaraan pameran investasi
 - Kerjasama bidang penanaman modal
 - Penyusunan Dokumen (Buku) peluang dan potensi investasi daerah
 - Inventarisasi data sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID)

6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan:

- Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- Monitoring dan evaluasi investasi daerah
- Penatalaksanaan Perencanaan dan Program
- Penyusunan Dokumen RUPM
- Rapat koordinasi perencanaan penanaman modal tingkat provinsi dan pusat

B. TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (Perka BKPM RI) Nomor 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal, terdapat 6 (enam) indikator yang harus dipenuhi. Adapun tingkat pencapaian SPM Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016 disajikan sebagai berikut.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Nilai	Keterangan
1	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	100 %	Tersedianya buku peluang dan potensi investasi
2	Kerjasama Bidang Penanaman Modal	• Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan • Antara usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/asing	Proses	Belum terealisasinya hasil kerjasama penanaman modal dengan Provinsi Jawa Tengah dan Regional Kalimantan

3	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	100 %	8 kali (target SPM minimal 1 kali)
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100 %	1 (satu) kali/tahun sosialisasi LKPM (target SPM minimal 1 kali)
5	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik	100%	Terkelolanya SIPID dan SIPIPISE
6	Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	100 %	Terlaksananya Sosialisasi tax holiday dan SIPIPISE (target SPM minimal 1 kali)

C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2016 yakni **peningkatan realisasi investasi**. Target peningkatan realisasi investasi adalah sebesar 15 %. Selain itu juga ditargetkan peningkatan rencana / nilai investasi sebesar 15%.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka direalisasikan 6 (enam) Program yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) Kegiatan pada BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016, dengan penjabaran sebagai berikut.

I. Program Kegiatan Non-Urusan (rutin perkantoran)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi kinerja (fisik) sebesar 90,00%

Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi kinerja (fisik) 50,00%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi kinerja (fisik) 85,00%
- Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan alat tulis kantor kinerja/fisik dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi kinerja (fisik) 50,00%
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Penyediaan Bahan Logistik dengan realisasi kinerja (fisik) 90,00%
- Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi kinerja (fisik) 90,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 90,00%
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 75,00%

Kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
- Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 75,00%

- Pengadaan komputer dengan realisasi kinerja (fisik) 0,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi kinerja (fisik) 85,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
 - Belanja Modal Kanopi dengan realisasi kinerja (fisik) 80,00%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan realisasi kinerja (fisik) 97,00%
- Kegiatan :
- Kursus, pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dengan realisasi kinerja (fisik) 95,00%
 - Pengembangan wawasan SDM BKPMMD Prov Kalsel dengan realisasi kinerja (fisik) 100,00%
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi kinerja (fisik) 90,00 %
- Kegiatan :
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan realisasi kinerja (fisik) 90,00%

II. Program Kegiatan Urusan Penanaman Modal

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.868.540.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.476.748.345,- atau 79,03 dan realisasi fisik sebesar 91,87%. Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.068.440.000 dan teralisasi sebesar Rp. 798.272.845,- atau 72,96 % dan realisasi fisik sebesar 90%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan pameran

investasi di dalam negeri sebanyak 9 kali. Kendala pelaksanaan yakni pada rencana promosi ke luar negeri yang dibatalkan oleh penyelenggaran *Borneo Investment Forum*, yakni BPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.

b. Kegiatan Kerjasama Bidang Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 167.800.000 dan teralisasi sebesar Rp. 167.096.900,- atau 97,20 % dan realisasi fisik sebesar 90%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Kerjasama Regional Kalimantan, pelaksanaan sosialisasi kerjasama, identifikasi peluang kerjasama investasi antar daerah di Kalimantan Selatan, dan pelaksanaan rapat koordinasi peningkatan pemberdayaan kerjasama usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) di Kalimantan Selatan.

c. Kegiatan Pembinaan Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 182.300.000 dan teralisasi sebesar Rp. 179.770.500,- atau 98,61 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi Perka No 14 Tahun 2009 tentang SPIPSE.

d. Kegiatan Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 235.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 149.508.000,- atau 63.62 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal berupa dokumen pemetaan potensi investasi dan media promosi potensi Kalimantan Selatan.

e. Kegiatan Inventarisasi Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 215.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 186.400.100,- atau 86.70 % dan realisasi fisik sebesar 90%. Adapun hasil kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi

dan Pelatihan SIPID kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal se Kalimantan Selatan.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Program ini dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.308.656.000,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.210.184.600,- atau 92,48% dan realisasi fisik sebesar 100%. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 360.496.000 dan teralisasi sebesar Rp. 322.059.350,- atau 89.34 % dan realisasi fisik sebesar 95%. Adapun hasil kegiatan ini adalah 22 BAP pembatalan dan 47 BAP Pengawasan.

b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 195.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 157.254.400,- atau 80,64 % dan realisasi fisik sebesar 90%. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen pelaporan penanaman modal daerah berupa directory perusahaan dan dokumen perkembangan PMA/PMDN.

c. Kegiatan Penatalaksanaan Perencanaan dan Program

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 80.720.000 dan teralisasi sebesar Rp. 73.069.000,- atau 90,52 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan sebanyak 6 dokumen berupa: LKPJ dan LPPD tahun 2015, LAKIP 2015, Laporan Tahunan 2015, Renja 2017, Renja Perubahan 2016, dan Renstra BKPMMD 2016-2021.

d. Kegiatan Penyusunan Dokumen RUPM

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 474.440.000 dan teralisasi sebesar Rp. 462.158.200 atau 97,41 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah penerbitan Dokumen dan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2025.

e. Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal tingkat Provinsi dan Pusat

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 198.000.000 dan teralisasi sebesar Rp. 195.643.650 atau 98,81 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Adapun hasil kegiatan ini adalah Terlaksananya RKPPMD dan KP3MN.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPM) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENCAPAIAN KINERJA BKPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	TARGET 2016 (sesuai RPJMD)		CAPAIAN 2016		persentase capaian	PERMASALAHAN
				%	Rp	Realisasi (Rp) *angka sementara	Peningkatan Realisasi (%)		
1	Peningkatan Rencana/ Nilai Investasi	Persentase peningkatan rencana investasi PMA dan PMDN	8.029.457.450.000	15,00%	9.233.876.067.500	8.653.272.297.417	7,77%	93,71%	- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Pelayanan belum optimal
2.	Peningkatan Realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN	8.636.714.080.000	15,00%	9.932.221.192.000	9.504.960.000.000	10,05%	95,70%	- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajiban menyampaikan LKPM - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat Provinsi dan Kab/Kota - Sinkronisasi perencanaan bidang penanaman modal - Perlambatan ekonomi global yang berdampak dinegara Indonesia - Investor luar negeri tidak lagi membeli batubara perusahaan yang ada beralih kepada BBM, karena BBM dinilai lebih murah - Harga karet ditingkat petani penggarap harganya sangat murah, mengakibatkan para petani karet berpindah profesi keusaha lain - Harga Kelapa sawit tandan buah segar yang tidak stabil cenderung menurun

D. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB/PILIHAN

BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan
3. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

E. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

Jumlah Karyawan/Karyawati Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember 2016 sebanyak 39 orang, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kualifikasi Pendidikan :

❖ Strata 2 (S2)	: 6 Orang
❖ Strata 1 (S1)	: 21 Orang
❖ Diploma	: 1 Orang
❖ SLTA	: 11 Orang
❖ SLTP	: -
❖ SD	: -

b. Pangkat dan Golongan :

❖ Pembina Utama Madya	: 1 Orang
❖ Pembina Tingkat I	: 3 Orang
❖ Pembina	: 2 Orang
❖ Penata Tingkat I	: 6 Orang
❖ Penata	: -
❖ Penata Muda Tingkat I	: 15 Orang

❖ Penata Muda	:	4 Orang
❖ Pengatur Tingkat I	:	1 Orang
❖ Pengatur Muda Tingkat I	:	3 Orang
❖ Pengatur	:	4 Orang
❖ Pengatur Muda	:	-
❖ Juru	:	-

c. Jumlah Pejabat Struktural :

❖ Eselon II	:	1 Orang
❖ Eselon III	:	5 Orang
Eselon IV	:	6 Orang

F. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pada BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 sebesar Rp191.292.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp4.050.152.000,00 dan Belanja Langsung (BL) untuk pelaksanaan program kegiatan sebesar Rp7.141.140.000,00. Adapun realisasi anggaran sebesar 84% terdiri dari 89% BTL dan 79% BL. Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 92,10%. Realisasi anggaran Belanja Langsung BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 disajikan pada tabel berikut :

No.	Program /No.DPA/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Dana	Serapan		Sisa Pagu	Keterangan
		Output		% Fisik	% Keu		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.630.220.000	89,09	73,91	686.224.398	
	• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya kebersihan kantor	20.000.000	100,00	100,00	-	
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya administrasi perkantoran	7.000.000	50,00	31,21	4.815.300	
	• Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	37.000.000	100,00	100,00	-	
	• Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya administrasi perkantoran	18.000.000	100,00	100,00	-	
	• Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya administrasi perkantoran	500.000.000	100,00	50,56	247.200.000	
	• Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	134.800.000	100,00	92,99	9.449.480	
	• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terkelolanya administrasi perkantoran	69.440.000	100,00	99,63	256.928	
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	177.000.000	90,00	76,65	41.329.500	

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMMD) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	• Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi ke luar daerah	1.211.980.000	90,00	75,22	300.328.644	
	• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya administrasi perkantoran	35.000.000	50,00	16,28	29.302.000	
	• Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	190.000.000	100,00	72,08	53.048.000	
	• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi ke dalam daerah	230.000.000	100,00	99,74	598.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		953.004.000	75,00	62,56	356.804.698	
	• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	64.424.000	100,00	95,85	2.673.596	
	• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor	211.500.000	75,00	52,48	100.504.800	
	• Pengadaan Komputer	Terlaksananya prasarana pendukung administrasi kantor	122.000.000	5,00	0,00	122.000.000	Terlambatnya panitia pengadaan pada ULP
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	251.440.000	100,00	98,60	3.520.160	
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya prasarana pendukung administrasi kantor	166.140.000	90,00	74,94	41.634.684	
	• Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang terpelihara	31.000.000	75,00	44,92	17.074.800	
	• Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor		106.500.000	80,00	34,80	69.438.000	Ketersediaan kas akhir tahun yang tidak mencukupi
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		361.970.000	97,50	92,87	25.808.461	
	• Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Terlaksananya kursus, diklat dan bimtek PNS	224.970.000	95,00	89,12	24.476.736	

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMMD) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	• Pengembangan Wawasan SDM BKPMMD Prov. Kalsel	Terlaksananya pengembangan wawasan terkait dengan pengembangan, pelayanan dan potensi investasi penanaman modal	137.000.000	100,00	99,04	1.315.200	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		15.000.000	100,00	86,11	2.083.500	
	• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	15.000.000	100,00	86,11	2.083.500	
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1.868.540.000	94,00	79,03	391.832.838	
	• Kerjasama Bidang Penanaman Modal	Terjalinnnya kerjasama dibidang penanaman modal	167.800.000	95,00	97,20	4.698.400	
	• Inventarisasi Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Terlaksananya pelatihan SIPID kepada Kab/Kota se Kalsel dan terlaksananya updating data SIPID, tersedianya data dan informasi potensi investasi di Kalsel	215.000.000	95,00	86,70	28.595.000	
	• Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya pameran investasi	1.068.440.000	90,00	72,96	288.906.176	Tidak dapat terlaksananya pameran investasi diluar negeri karena dibatalkan penyelenggara Borneo Investment Forum (Kaltim)
	• Pembinaan Pelayanan Penanaman Modal	Terlaksana sosialisasi terkait kebijakan penanaman modal dan terlaksana pembinaan pelayanan penanaman modal	182.300.000	95,00	98,45	2.825.650	

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMMD) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

	• Penyusunan Dokumen (Buku) Peluang dan Potensi Investasi Daerah	Tersedianya data dan informasi potensi penanaman modal	235.000.000	95,00	88,60	26.790.000	
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		1.308.656.000	97,00	92,48	98.410.931	
	• Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal	Terlaksananya bimbingan pelaksanaan pelayanan penanaman modal	360.496.000	95,00	89,34	38.428.874	
	• Monitoring dan Evaluasi Investasi Daerah	Peningkatan pemasukan LKPM akurasi data dan terbinanya perusahaan PMA/PMDN yang tidak lancar, Tersedianya dokumen pelaporan penanaman modal daerah (Directory perusahaan), tersedianya dokumen evaluasi penanaman modal daerah (perkembangan penanaman modal daerah)	195.000.000	90,00	80,64	37.752.000	
	• Penatalaksanaan Perencanaan dan Pelaporan Program Penanaman Modal	Tersedianya laporan pelaksanaan perencanaan dan program BKPMMD	80.720.000	100,00	90,52	7.652.256	
	• Penyusunan Dokumen RUPM	Dokumen RUPM	474.440.000	100,00	97,41	12.287.996	
	• Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Tingkat Provinsi dan Pusat	Terlaksananya RKPPMD, KP3MR, KP3MN dan sinkronisasi program terkait pengembangan penanaman modal	198.000.000	100,00	98,81	2.356.200	
	Total		7.137.390.000.00	92,10	78,69	1.561.164.826	

G. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Alur atau proses kegiatan pekerjaan dimulai dari Kepala Sub Bidang sebagai ujung tombak proses kegiatan dan PPTK yang kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang untuk koreksi selanjutnya disampaikan kepada pimpinan untuk mendapat arahan dan persetujuan. Adapun tahapan proses perencanaan pembangunan BKPMMD dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Rapat teknis bidang penanaman modal;
2. Membuat Renja Tahun 2016 mengacu ke RENSTRA SKPD di serahkan ke Bappeda Prov. Kalsel;
3. Proses Perencanaan oleh Bappeda untuk kegiatan Tahun 2016;
4. Pembuatan, pengusulan, dan penyampaian RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016;
5. Verifikasi Renja Awal RENJA-SKPD Tahun 2016;
6. Penerbitan Renja Akhir Melalui beberapa tahap penyempurnaan;
7. Pembahasan RKA-SKPD di serahkan ke Biro Keuangan dan pengesahan dari tim verifikasi;
8. Terbitnya DPA-SKPD Tahun 2016;
9. Pembuatan Penetapan Kinerja Tahun 2016;
10. Pelaksanaan Kegiatan SKPD Tahun 2016;
11. Usul Pembuatan RKA-SKPD Perubahan Tahun 2016;
12. Pembahasan di Biro Keuangan oleh Tim verifikasi (Bappeda, Inspektorat, Dispenda);
13. Terbitnya DPPA-SKPD Tahun 2016;
14. Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan DPPA-SKPD Tahun 2016.

H. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN (LENGKAP, KURANG, MENCIKUPI ATAU LAINNYA)

Kondisi sarana dan prasarana BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Desember tahun 2015 disajikan pada tabel berikut.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMMD) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah	Kondisi Barang		Keterangan
			Rusak	Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Gedung	1 unit		Baik	Gedung Baru
2	Mobil Dinas Roda 4 (Innova, Avanza)	7 Buah		Baik	1 Dari Pemprov, 6 Pengadaan Langsung
3	Sepeda Motor (Vixion, CBR, Supra, Vario dan Beat)	7 Buah		Baik	Pengadaan Langsung
4	Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (Mesin Generator)	2 Buah	Rusak	Baik	1 Rusak
5	Alat Pemeliharaan Tanaman	1 Buah		Baik	Mesin Pemotong Rumput
6	Mesin Tik	4 Buah		Baik	
7	Mesin Fotocopy	1 Buah		Baik	
8	Almari Besi	9 Buah	Rusak	Baik	4 rusak
9	Filling Besi	46 Buah	Rusak	Baik	5 rusak
10	Brankas	1 Buah		Baik	
11	Lemari Kaca	1 Buah		Baik	
12	Alat Penyimpanan Lainnya	2 Buah		Baik	Credensa Ruang Receptionis
13	Mesin Absensi	2 Buah	Rusak	Baik	1 buah rusak
14	Alat Kantor Lainnya (Infokus)	3 Buah	Rusak	Baik	2 buah rusak di Ruang Aula
15	Alat Kantor Lainnya (Partisi)	2 Buah		Baik	Ruang Kepala dan Rapat
16	Alat Kantor Lainnya (Walpaper)	1 Buah		Baik	Ruang Kepala
17	Lemari Kayu	6 Buah	Rusak	Baik	4 rusak
18	Meja Rapat	17 Buah		Baik	Ruang Aula
19	Meja Receptionis	1 Buah		Baik	
20	Meja Tambahan	1 Buah		Baik	Meja Kecil di Ruang Kepala
21	Kursi Rapat	50 Buah		Baik	Di Ruang Rapat
22	Sofa	5 Buah		Baik	
23	Kaca Bening	3 Buah		Baik	
24	Korden	1 Set		Baik	
25	Karpet	9 Buah	Rusak	Baik	di Ruang Musholla dan Ruang Kepala

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPM) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

26	Jam Mekanis	13 Buah	Rusak	Baik	8 rusak
27	Lemari Es	2 buah		Baik	
28	AC Split	8 buah	Rusak	Baik	4 rusak
29	Kipas Angin	6 buah		Baik	
30	Alat Dapur	1 set		Baik	Rak piring dan peralatan dapur
31	Televisi	2 buah		Baik	
32	Sound System	1 set		Baik	
33	Dispencer	1 buah		Baik	
34	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 buah	Rusak		Alat Penyedot Debu
35	Alat Rumah Tangga Lainnya	8 buah	Rusak		UPS
36	Alat Rumah Tangga Lainnya	2 Buah		Baik	Granit dan Backdroft
37	Alat Rumah Tangga Lainnya	1 buah		Baik	Mesin pompa air
38	Komputer unit/Jaringan Lainnya	1 buah		Baik	Server
39	Komputer	48 Buah	Rusak	Baik	15 rusak
40	Laptop	34 Buah		Baik	
41	Personal Komputer Lainnya	13 Buah		Baik	
42	Hardisk	1 buah		baik	
43	Printer	27 Buah	Rusak	Baik	11 bh rusak
44	Peralatan Personal Komputer Lainnya (Flasdisk dan Tinta Botol)	27 Buah		Baik	Rusak
45	Peralatan Personal Komputer Lainnya	2 buah		baik	LCD Proyektor
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2 buah		baik	
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 buah		baik	
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14 buah		baik	
49	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	39 buah	rusak	baik	

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMMD) PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

50	Meja Rapat Pejabat	11 buah		Baik	Ruang Kepala dan Aula
51	Kursi kerja Pejabat Eselon II	2 buah		Baik	
52	Kursi kerja pejabat Eselon IV	18 buah	Rusak	Baik	5 rusak
53	Kursi kerja diruang Pejabat Ess	78 buah		Baik	
54	Kursi Tamu diruang Pejabat Ess	2 set		Baik	
55	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4 buah		Baik	Lemari kayu kaca
56	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	39 buah		Baik	Lemari besi
57	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	4 buah		Baik	Lemari besi kaca
58	Peralatan Studio Visual	9 buah		Baik	kamera
59	Peralatan Studio Visual	8 buah	Rusak		UPS
60	Peralatan Studio Visual	11 Buah		Baik	Alat2 sound system
61	Peralatan Studio Visual	1 set		Baik	Kamera CCTV
62	Telepon (Pabx)	1 set		Baik	Server

I. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

Secara umum permasalahan investasi di Kalimantan Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan perundang-undangan belum optimal, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota khususnya dalam penanganan pelayanan dibidang penanaman modal.
- 2) Belum adanya keseragaman lembaga (Badan/Dinas) di Kabupaten/Kota yang menangani penanaman modal secara khusus, akibatnya menyulitkan Provinsi dalam melakukan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan Penanaman Modal.
- 3) Pentingnya peningkatan kemampuan aparatur BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugasnya terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Perlunya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN.

2. Solusi

- ✓ Melengkapi beberapa permasalahan tersebut di atas dengan memanfaatkan Tim TASK FORCE telah diupayakan penyelesaiannya baik Task Force di pusat maupun di daerah. Hal ini guna mengembalikan iklim investasi yang lebih kondusif. Tugas dari pada Tim Task Force ini meliputi berbagai aspek permasalahan yang dihadapi oleh para investor khususnya investor PMA/PMDN.
- ✓ Melakukan rapat-rapat baik regional maupun koordinasi guna pemecahan masalah yang terkait dengan stakeholder.

- ✓ Upaya peningkatan pengetahuan terhadap pegawai terus dilakukan baik yang bersifat formal maupun non formal, seperti pelatihan, pendidikan, kursus-kursus dan sebagainya. Ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi aparatur.
- ✓ Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan PMA/PMDN terus dilakukan, agar perusahaan PMA/PMDN berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

J. PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DIRAIH

-

K. HAL-HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN

-

II. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Telah ditandatangani dan disepakati untuk menjalin kerjasama Antar daerah sebanyak 2 (dua) perjanjian kerjasama bidang penanaman modal, yaitu :

1. Kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan
2. Kerjasama bidang Penanaman Modal Regional Kalimantan

B. Kerjasama dengan pihak ketiga

BKPMMD Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banjarmasin untuk penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen tersebut berisi kajian potensi penanaman modal di Kalimantan Selatan

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal

BKPMMD Prov Kalsel rutin berkoordinasi kepada BKPM RI dalam hal pengembangan penanaman modal di daerah. Adapun beberapa kegiatan yang bekerjasama dengan BKPM RI antara lain :

1. Sosialisasi dan Pelatihan SPIPSE
2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) yang mencerminkan keadaan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Banjarbaru, Januari 2017

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DR. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19710321 199302 1 001